KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perusahaan Negara Sakit Akut Bakal Ditutup
Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

Perusahaan Negara Sakit Akut Bakal Ditutup

Tak kunjung membaik hingga sembilan bulan ke depan, BUMN sakit bakal ditutup

Lailatul Anisah

JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengisyaratkan bakal kembali menutup perusahaan pelat merah yang sakit.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan dari hasil evaluasi PT Perusahaan Pengalolaan Aset (PPA).

"Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki, kalau enggak bisa, akan kami tutup. Tapi kami lihat sampai sembilan bulan ini, seperti apa hasilnya," ungkap Tiko, panggilan akrab Kartika Wirjoatmojo ditemui usai laporan kinerja Id Food 2023, Senin (8/1).

Meski begitu, Kementerian BUMN tidak menjelaskan secara mendetail berapa banyak BUMN yang akan ditutup. "Saat ini belum ada, masih kami kaji," ungkap Tiko.

Berdasarkan catatan KONTAN, saat ini masih ada 15 BUMN yang masih menjadi "pasien" PPA dan sedang dikaji untuk penanganannya.

Ke-15 BUMN itu adalah PT Amarta Karya, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Djakarta Lloyd, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Industri Kapal Indonesia. Kemudian ada PT Indah Karya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Semen Kupang, PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Primissima, PT Varuna Tirta Prakasya dan PT PANN Pembiayaan Maritim (anak usaha PT PANN).

Kementerian BUMN memang ingin memaksimalkan kinerja BUMN dengan menutup beberapa anak usaha yang tidak bekerja dengan baik.

Hingga akhir 2023, Kementerian BUMN telah menutup tujuh BUMN bermasalah. Ketujuh perusahaan pelat merah itu antara lain PT Iglas, PT Industri Sandang Nusantara, PT Istaka Karya, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kertas Leces dan PT Merpati Nusantara Airlines.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai, rencana penutupan BUMN yang bermasalah membuktikan kinerja Kementerian BUMN masih jauh dari ideal.

Dalam kondisi seperti ini, tugas Kementerian BUMN adalah menyelamatkan BUMN yang sedang sakit dengan berbagai skema, alih alih melakukan penutupan. "Kalau sampai banyak yang ditutup, implikasinya bisa ke kepercayaan investor yang ingin kerja sama dengan BUMN karena ketidakpastian kebijakan, dan performa BUMN yang bermasalah," kata dia, Selasa (9/1).

Selain itu, banyaknya BUMN bermasalah berakibat pada tekanan, kreditur, vendor maupun kontraktor proyek yang terlibat dalam operasional BUMN.

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus berpendapat, sebelum menutup BUMN, Kementerian BUMN perlu melihat dulu sektor usaha beberapa BUMN tersebut. "Apakah masuk kategori penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak atau tidak," kata dia.

Jika masuk kategori penting, maka negara tidak bisa membubarkan begitu saja. "Karena ada tanggung jawab negara terhadap sektor industri tersebut," ucap dia.

Absennya Prinsip GCG

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Amin A.K menilai, penyebab banyaknya perusahaan pelat merah yang bermasalah lantaran pengurusnya tidak menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG).

Saat ini terdapat 15 perusahaan dan anak usaha BUMN sakit yang sedang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Perusahaan ini terancam "disuntik mati" jika tidak bisa diselamatkan kembali. Amin menegaskan, 15 BUMN tetap harus menunaikan kewajibannya jika terpaksa tidak bisa diselamatkan. Misalnya, pelunasan pembayaran utang terhadap seluruh vendor dan kreditor.

Selanjutnya, realokasi sumber daya dan aset milik BUMN yang dibubarkan harus dilakukan secara cermat dan harus dipastikan, realokasi sumber daya dan aset betul-betul berpindah tangan ke negara atau BUMN lainnya. "Banyak kasus munculnya "penumpang gelap" dalam proses pembubaran BUMN yang menguntungkan sekelompok atau segelintir orang," ungkap Amin, Selasa (9/1). Hak karyawan BUMN yang dibubarkan juga harus ditunaikan, termasuk dana pensiun yang semestinya mereka terima.